

## The Effect of Regional Original Income on Economic Growth in Central Sulawesi Province for the 2015-2019 Period

**Ramla Ilham Darise**  
Fakultas Ekonomi  
Program Studi Ekonomi Pembangunan  
Universitas Madako Tolitoli

**ABSTRACT:** This study aims to determine and analyze the Effect of Regional Original Income on Economic Growth in Central Sulawesi Province for the 2015-2019 Period. The instrument used in this study is a ratio scale with multiple linear regression analysis techniques. The results of multiple linear analysis show that Regional Original Income has an effect on Economic Growth, Regional Taxes have an effect on Economic Growth, Regional Levies have an effect on Economic Growth, Results of Separated Regional Wealth Management have no effect on Economic Growth, Other Legitimate Regional Original Income has an effect on Economic Growth in Regencies/Cities in Central Sulawesi for the 2015-2019 Period. Regional Taxes, Regional Retributions, Results of Separated Regional Wealth Management and Others PAD Which together or simultaneously affect Economic Growth in Regencies/Cities in Central Sulawesi for the 2015-2019 Period.

**Keywords:** taxes, user charges, local revenue, economic growth.

**Corresponding Author:** [ramladarise77@gmail.com](mailto:ramladarise77@gmail.com)

## **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2015-2019**

**Ramla Ilham Darise**

Fakultas Ekonomi

Program Studi Ekonomi Pembangunan

Universitas Madako Tolitoli

**ABSTRAK:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2015-2019. Instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala rasio dengan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil analisis linear berganda menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah Periode 2015-2019. Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Lain-Lain PAD Yang secara bersama-sama atau serempak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah Periode 2015-2019.

**Kata kunci:** pajak, retribusi, pendapatan asli daerah, pertumbuhan ekonomi.

*Submitted: 5 May; Revised: 15 May; Accepted: 26 May*

**Corresponding Author:** [ramladarise77@gmail.com](mailto:ramladarise77@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Diberlakukannya Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah menuntut pemerintah daerah untuk melaksanakan desentralisasi dan memacu pertumbuhan ekonomi guna peningkatan kesejahteraan masyarakat di mana tujuan penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan produksi barang dan jasa di semua kegiatan ekonomi suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Kegiatan ekonomi pada dasarnya adalah proses pemanfaatan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan *output*, oleh karena itu proses ini pada saat akan menghasilkan aliran imbalan atas faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat diukur, dan sejauh mana kegiatan ekonomi tersebut akan memberikan pendapatan lebih bagi masyarakat dalam kurun waktu tertentu (Reggie, 2017). Ada banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, antara lain pendapatan, belanja dan pembiayaan. Diantara ketiga komponen tersebut, pendapatan merupakan indikator yang sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Tujuan utama penyusunan peraturan perundang-undangan ini adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial yang adil pada semua lapisan masyarakat. Sasaran ini akan tercapai jika didukung oleh sumber pendanaan (pendapatan daerah) yang optimis dalam mendanai program daerah (belanja daerah).

Dua kategori utama dana daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pemerintah daerah dan dana perimbangan dari pemerintah pusat. PAD merupakan hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan daerah dari pendapatan asli daerah lain yang sah. Tujuannya untuk memberikan keleluasaan bagi daerah dalam menggali sumber dana untuk pelaksanaan kebijakan perpajakan. Otonomi daerah merupakan perwujudan asas desentralisasi. Daerah dengan pendapatan yang berasal dari sumber daerah yang tinggi memiliki kecenderungan dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya dan lebih mampu membiayai program yang lebih banyak. PAD adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari kekayaan milik daerah sendiri yang dikelola berdasarkan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerimaan sumber Pendapatan Asli Daerah menopang seluruh aktivitas kegiatan perekonomian masyarakat menjadi program pemerintah daerah dalam upaya peningkatan dan kemajuan dalam mensejahterakan masyarakat yang makin bertambah tinggi. Kenyataannya banyak fenomena dan masalah yang timbul di dalam pertumbuhan ekonomi wilayah, tak terkecuali di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini mengingat pertumbuhan ekonomi yang cepat berdampak terhadap ketimpangan di Provinsi Sulawesi Tengah dan pemerataan pembangunan menjadi permasalahan utama penyebab tingkat kemiskinan. Untuk melihat

pertumbuhan ekonomi disuatu daerah maka kenaikan PDRB dijadikan acuan tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau kecil.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat dari harga PDRB yang konstan. Melalui tabel 1.1 dan, dapat dilihat perkembangan PDRB pada 12 Kabupaten dan 1 Kota pada Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2015-2019. Nampak Kabupaten dan Kota yang ada mengalami pertumbuhan atau perkembangan PDRB tiap tahunnya, PDRB tertinggi terdapat pada Banggai sebesar Rp. 19.724.807 di tahun 2019 dan teranda pada Kabupaten BanggaiLaut sebesar Rp. 1.353.141 di tahun 2015.

Besaran realisasi pendapatan asli daerah (PAD) pada 12 Kabupaten dan 1 Kota di Sulawesi Tengah tahun 2015-2019. Nampak Kota Palu dan beberapa Kabupaten lainnya mengalami kenaikan realisasi penerimaan PAD tiap tahunnya, realisasi PAD tertinggi pada Kota Palu yakni sebesar Rp.284.380.010 di tahun 2017 dan terendah pada Kabupaten Banggai laut yakni sebesar Rp. 12.290.012 di tahun 2015.

Peningkatan PAD salah satunya dapat di lakukan dengan meningkatkan efisiensi sumber daya dan rekomendasi yang terbatas, atau dengan meningkatkan efisiensi pemungutan yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada. Salah satu potensi yang mempercepat pertumbuhan ekonomi adalah memberi peran secara maksimal kepada perubahan kepada daerah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan mendorong pertumbuhan ekonomi sebagai pelayanan bagi masyarakat dalam menyediakan kebutuhan masyarakat yang tidak disediakan oleh pelaku ekonomi lain, serta fungsi sebagai sumber pendapatan asli daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengambil judul **"Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2015-2019"**.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Pajak**

Pengertian pajak secara luas perlu kita bahas dulu sebelum membahas definisi pajak daerah dan pajak pusat. Mengutip buku berjudul "Perpajakan" tulisan Mardiasmo, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

### **1. Pajak Daerah**

Menurut UU No 28 Tahun 2009 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 pajak kabupaten/kota dibagi menjadi beberapa sebagai berikut :

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran

- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- k. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Seperti halnya dengan pajak pada umumnya, pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu :
  - 1) Sebagai sumber pendaatan daerah
  - 2) Sebagai alat pengatur.

## 2. Retribusi Daerah

Pemerintah pusat kembali mengeluarkan regulasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, melalui Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009. Dengan UU ini dicabut UU Nomor 18 Tahun 1997, sebagaimana sudah diubah dengan UU Nomor 34 Tahun 2000. Berlakunya UU pajak dan retribusi daerah yang baru disatu sisi memberikan keuntungan daerah dengan adanya sumber-sumber pendapatan baru, namun disisi lain ada beberapa sumber pendapatan asli daerah yang harus dihapus karena tidak boleh lagi dipungut oleh daerah, terutama berasal dari retribusi daerah. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke dalam 3 golongan retribusi, yaitu :

- a. Retribusi Jasa Umum  
Pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta data dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- b. Retribusi Jasa Usaha  
Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu  
Pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

## 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup :

- 1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah / BUMD.

2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara / BUMN
3. Bagian laba atas penyertaan modal perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.

#### **4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan Pendapatan Asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendanaan ini juga merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengklasifikasikan yang termasuk dalam pendapatan asli daerah yang sah meliputi :

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Keuntungan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- e. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang ataupun jasa oleh pemerintah.

#### **Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Penelitian Lily Kusumawati dan I Gusti Bagus Wiksuana (2018) dengan judul Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Sarbagita Provinsi Bali. Sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Sarbagita Provinsi Bali.

Persamaan Penelitian terletak pada variabel independen Pendapatan Asli Daerah dan variabel dependen pertumbuhan ekonomi. Perbedaan penelitian terletak pada variabel Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai variabel independen yang digunakan peneliti terdahulu

Penelitian Ida Ayu Saraswati dan I Wayan Ramantha (2018) dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal dan Investasi Swasta sebagai Pemoderasi.

Hasil penelitian menunjukkan PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Belanja modal memperlemah pengaruh PAD terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan investasi swasta mem[erkuat pengaruh PAD terhadap pertumbuhan ekonomi.

Persamaan penelitian adalah sama-sama menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel independen dan variabel dependen, perbedaan penelitian terletak pada variabel belanja modal

dan investasi swasta sebagai variabel moderasi yang digunakan peneliti terdahulu.

Penelitian Desak Nyoman Utami dan I Gusti Bagus Indrajaya (2019) yang berjudul Pengaruh PAD dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Bali. Hasil Penelitian menunjukkan Pendapatan Asli Daerah dan belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pendapatan asli daerah, belanja modal dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Pada penelitian ini pertumbuhan ekonomi adalah variabel mediasi pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kesejahteraan masyarakat, tetapi pertumbuhan ekonomi bukan variabel mediasi pengaruh belanja modal terhadap kesejahteraan masyarakat.

Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah menggunakan variabel Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel independen. Perbedaannya terletak pada peneliti terdahulu menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi sebagai variabel mediasi terhadap kesejahteraan masyarakat, sementara peneliti menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen.

### **Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai tambahan keluaran yang diukur dengan Menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) Suatu Daerah Dan *Produk Domestic Regional Bruto* (PDRB) suatu daerah.

Dalam jangka panjang, pertumbuhan ekonomi merupakan proses peningkatan output per kapita. Penekanan ditempatkan pada tiga aspek, yaitu proses, keluaran per kapita dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses, bukan gambaran kondisi ekonomi sekaligus. Di sini, kita melihat aspek dinamika perekonomian, yaitu bagaimana perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Fokusnya adalah pada perubahan atau perkembangan itu sendiri.

### **Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah, atau yang selanjutnya disebut PAD, adalah pendapatan yang diterima suatu daerah dari sumber-sumber daerah di dalam wilayahnya sendiri, yang dipungut sesuai dengan peraturan daerah atau peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan peraturan daerah. sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat mendanai kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah (Baldrice, 2017: 23).

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang bersumber dari sumber-sumber di dalam wilayahnya sendiri. Semakin tinggi peran PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerah (Carunia, 2017: 119). Sumber pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah,

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang dipisahkan.

## **METODE PENELITIAN**

### **Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan diseluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah dengan pengambilan data melalui situs Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu Pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah yang lainnya yang sah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2015-2019. Penelitian ini dilakukan dari bulan April - september tahun 2021.

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Sugiyono (2018:7) Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen melalui pengujian hipotesis dan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Metode kuantitatif adalah pengukuran pendapatan yang dapat diklarifikasikan secara kongkrit, dapat diamati dan dapat diukur dengan menghubungkan variabel-variabel.

### **Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel**

#### **Populasi**

Menurut Sugiyono (2018: 80), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Sasaran populasi penelitian ini adalah Kabupaten/Kota yang terdaftar di Provinsi Sulawesi Tengah berjumlah 12 Kabupaten dan 1 Kota selama 5 tahun terakhir dari tahun 2015-2019 .

#### **Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel**

Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh anggota populasi yaitu duabelas Kabupaten dan satu Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2015-2019. Dalam penelitian ini menggunakan metode observasi non partisipan. Dalam metode non partisipan ini, peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen.

Teknik Pengambilan sampel peneliti menggunakan teknik sampel jenuh. Sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan menjadi sampel (Sugiyono, 2018:139).

### **Operasionalisasi Variabel**

#### **A. Variabel Dependen**

Pertumbuhan Ekonomi (Y) Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai tambahan keluaran yang

diukur dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah.

B. Variabel Independen

1. Pajak daerah (X1) adalah pembayaran wajib daerah yang terutang oleh orang atau badan yang diwajibkan menurut undang-undang dan tidak dikompensasikan secara langsung, digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah yang paling sejahtera bagi rakyat.
2. Retribusi Daerah (X2) adalah penerimaan yang diterima oleh pemerintah daerah setelah memberikan pelayanan tertentu kepada penduduk yang mendiami wilayah yurisdiksinya, kontribusi retribusi daerah diberikan secara langsung oleh pemerintah daerah kepada penduduk yang membayar retribusi tersebut.
3. Hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan (X3) objek pendapatan yang di kembangkan oleh pemerintah daerah yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD), bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah (BUMN), dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. Dengan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat namun disisi lain juga diharapkan dapat memberikan kontribusi laba terhadap pendapatan asli daerah Sulawesi Tengah.
4. Pendapatan daerah lain yang sah (X4) untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan di rinci menurut objek pendapatannya

**Metode Analisis**

Analisis kuantitatif dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Regresi linear berganda merupakan salah satu alat statistik parametrik dengan fungsi menganalisis dan menerangkan keterkaitan antara dua atau lebih faktor penelitian yang berbeda nama, melalui pengamatan beberapa hasil observasi (pengamatan) di berbagai bidang kegiatan. Analisis regresi linear berganda untuk menguji pengaruh variabel independen yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah mempunyai pengaruh secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi. Serta pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah mempunyai pengaruh secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

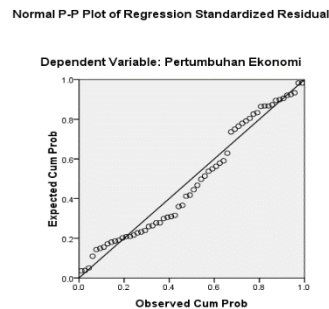
### Hasil Penelitian

#### Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah model linear berganda yang digunakan pada penelitian ini memenuhi persyaratan seperti : uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Masing-masing pengujian asumsi klasik tersebut secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

##### 1. Uji Normalitas

Dengan bantuan SPSS 16 hasil uji normalitas data dapat diperlihatkan pada gambar 1 sebagai berikut :



Gambar 1. Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji normalitas pada penelitian ini dapat dilihat bahwa titik menyebar disekitar garis diagonal dan penyebaran mengikuti arah garis diagonal.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa penyebaran data mendekati normal atau memenuhi asumsi normalitas.

##### 2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas yaitu adanya hubungan linear antar variabel independen dan model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya multikolinearitas atau tidak terjadi korelasi antarvariabel independen.

Hasil uji multikolinearitas dengan menggunakan *Variance Inflation Faktor*(VIF) dan *Tolerance* seperti pada table berikut :

Table 1. Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	3.202	1.266		2.529	.014		
	Pajak Daerah	.217	.063	.344	3.443	.001	.531	1.883
	Retribusi Daerah	.176	.047	.308	3.726	.000	.775	1.291
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-.048	.094	-.048	-.512	.611	.600	1.667
	lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	.387	.078	.484	4.938	.000	.550	1.819

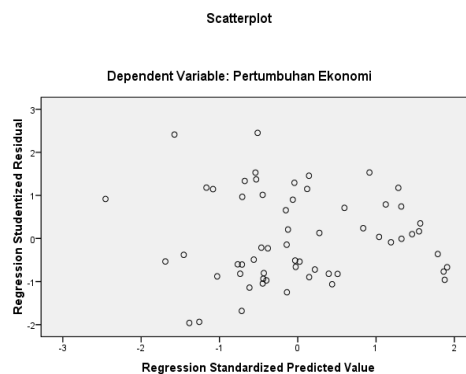
a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Sumber data : data yang telah diolah menggunakan SPSS 16.0

Berdasarkan tabel diatas hasil pengujian multikolinearitas menunjukkan nilai *Variance Inflation Faktor*(VIF) masing-masing variabel independen lebih besar dari 1 dan *Tolerancemasing-masing* variabel mendekati angka 1. Hal ini berarti model regresi terbebas dari masalah multikolinearitas.

### 3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian residual antara yang satu dengan yang lain. Prasyarat yang harus dipenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat pada grafik *scatterplot*, pada gambar 4.2 sebagai berikut:



Gambar 2. *Scatter Plot* Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat grafik *scatter plot* diatas bahwa tidak ada pola yang jelas, serta titik menyebar dikiri dan kanan angka 0 pada sumbu Y, maka dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

### 4. Uji Autokorelasi

uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan-kesalahan pada data runtut waktu. Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Ujiautokorelasi dilakukan dengan cara melihat nilai statistik*durbin-Watson* dengan kriteria pengambilan keputusan menurut Ghozali (2016) bahwa DW terletak antara -2 dan +2 maka tidak ada autokorelasi. Hasil uji *Durbin-Watson* dapat dilihat pada tabel 4.8 Sebagai berikut :

Tabel 2. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.842 <sup>a</sup>	.709	.688	.35869	.709	33.513	4	55	.000	1.225

a. Predictors: (Constant), lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Pajak Daerah

b. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Sumber data: data yang telah diolah menggunakan SPSS 16.0

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai *Durbin-Watson* adalah 1.225. berdasarkan tabel *Durbin-Watson* dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terdapat masalah autokorelasi.

Semua hasil analisis regresi linier berganda diperoleh hasil penelitian yang dilakukan yaitu pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. Hasil Perhitungan Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.202	1.266		2.529	.014
	Pajak Daerah	.217	.063	.344	3.443	.001
	Retribusi Daerah	.176	.047	.308	3.726	.000
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-.048	.094	-.048	-.512	.611
	lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	.387	.078	.484	4.938	.000

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Sumber data : data yang telah diolah menggunakan SPSS 16.0

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel diatas menunjukkan konstanta untuk persamaan regresinya bernilai 3.202 dan nilai untuk koefisien regresinya adalah 0.217 untuk pajak daerah ( $X_1$ ), 0.176 untuk retribusi daerah ( $X_2$ ), -0.048 untuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ( $X_3$ ), dan 0.387 untuk lain-lain PAD yang sah ( $X_4$ ). Sehingga persamaan regresinya adalah sebagai berikut :

$$Y = 3,202 + (0,217.60) + (0,176.60) + (-0,048.60) + (0.387.60)$$

### Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis menggunakan model regresi linear berganda dengan metode enter pada tingkat signifikan 0.05. regresi linear berganda digunakan untuk menguji data secara parsial (Uji t) yaitu pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah yang di ukur dengan realisasi pendapatan terhadap pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan PDRB atas dasar harga konstan dan secara simultan (Uji F) yaitu pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah bersama-sama memengaruhi pertumbuhan ekonomi.

### Uji Signifikan Parsial (Uji-t)

Uji-t dikenal dengan uji parsial, yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap

variabel terikatnya. Pengujian ini yaitu dengan membandingkan nilai probabilitas atau p-value (sig-t) dengan taraf signifikan 0.05. jika nilai p-value lebih kecil dari 0.05 maka  $H_a$  di terima, dan sebaliknya jika p-value lebih besar dari 0.05 maka  $H_a$  ditolak. Hasil uji-t dengan menggunakan model regresi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. Hasil Uji Parsial (Uji-t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.202	1.266		2.529	.014
Pajak Daerah	.217	.063	.344	3.443	.001
Retribusi Daerah	.176	.047	.308	3.726	.000
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-.048	.094	-.048	-.512	.611
lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	.387	.078	.484	4.938	.000

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Sumber data : data yang telah diolah menggunakan SPSS 16.0

Hasil hipotesis diketahui  $t_{hitung}$  untuk pajak daerah sebesar 3.443 dengan signifikan 0.001,  $t_{hitung}$  untuk retribusi daerah sebesar 3.726 dengan signifikan 0.000,  $t_{hitung}$  untuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar -0.512 dengan signifikan 0.611,  $t_{hitung}$  untuk lain-lain PAD yang sah sebesar 4.938 dengan signifikan 0.000.

### Uji Signifikan Simultan (Uji-F)

Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan dalam penelitian ini sudah sesuai atau belum. Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan tingkat kesalahan 5% (0.05), berikut tabel dibawah ini :

Tabel 5. Hasil Uji Simultan (Uji f)

ANOVA <sup>b</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	17.247	4	4.312	33.513	.000 <sup>a</sup>
	Residual	7.076	55	.129		
	Total	24.323	59			

a. Predictors: (Constant), lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Pajak Daerah

b. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

Sumber data : data yang telah diolah menggunakan SPSS 16.0

Berdasarkan hasil uji simultan (Uji-f) bahwa diketahui nilai  $F_{hitung}$  sebesar  $33.513 > F_{tabel} 2,54$  dengan nilai signifikan 0.000. Nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  dengan sampel  $(n) = 60$ , jumlah variabel bebas  $(k) = 4$ , taraf signifikan  $(\alpha) = 5\%$  *degree of freedom*  $= n - (k+1) = 55$ , sehingga diperoleh  $F_{tabel}$  sebesar 2,54. Nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $33.513 > 2,54$ ) dengan tingkat signifikan lebih kecil dari tingkat ketidakpercayaan ( $0.000 < 0.05$ ).

### Koefisien Determinasi (R square)

Uji *R Square* bertujuan untuk mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen atau variabel terikat. Hasil pengukuran dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 6. Uji Koefisien Determinasi (*R Square*)

Model Summary <sup>b</sup>										
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.842 <sup>a</sup>	.709	.688	.35869	.709	33.513	4	55	.000	1.225

a. Predictors: (Constant), lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Pajak Daerah

b. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

*Sumber data: data yang telah diolah menggunakan SPSS 16.0*

Hasil output SPSS memberikan nilai *Adjusted R Square* 0.688. ini berarti variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 68% dan 32% sisanya dijelaskan oleh variabel independen lainnya diluar variabel independen yang ada dalam penelitian ini. Contohnya Dana Perimbangan dan Belanja Modal.

## PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap 12(duabelas) Kabupaten dan 1(satu) Kota di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2015-2019, diperoleh hasil yang menggambarkan tingkat realisasi pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari nilai PDRB berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. PAD bersumber dari empat jenis yaitu, Pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Penjelasan pengaruh variabel X terhadap variabel Y baik secara simultan maupun parsial adalah sebagai berikut:

### Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari hasil persamaan regresi menunjukkan bahwa pajak daerah di Provinsi Sulawesi Tengah berpengaruh positif sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Tengah. Diperoleh koefisien regresi untuk pajak daerah sebesar 0.217 hal ini berarti setiap terjadi penambahan pajak daerah 1% maka akan terjadi kenaikan terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0.217 satuan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi penerimaan pajak daerah di Provinsi Sulawesi Tengah pertumbuhan ekonomi akan semakin meningkat, begitu sebaliknya jika penerimaan pajak daerah terjadi penurunan maka pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah akan semakin menurun. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Christofel(2018) mengatakan variabel Pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara.

### **Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada penelitian menunjukkan bahwa retribusi daerah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dari hasil persamaan regresi menunjukkan bahwa retribusi daerah di Provinsi Sulawesi Tengah berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Tengah. Diperoleh koefisien regresi untuk retribusi daerah sebesar 0.176 hal ini berarti setiap terjadi penambahan retribusi daerah 1% maka akan terjadi kenaikan terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0.176 satuan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi penerimaan retribusi daerah maka pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Tengah akan semakin meningkat, begitu sebaliknya jika penerimaan retribusi daerah terjadi penurunan maka pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah akan semakin menurun. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ju Kumala Dewi (2018) retribusi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Retribusi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah.

### **Pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dari hasil persamaan regresi menunjukkan bahwa pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan di Provinsi Sulawesi Tengah berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Tengah. Diperoleh koefisien regresi untuk pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar -0.048 hal ini berarti setiap terjadi penambahan pajak daerah 1% maka akan terjadi penurunan terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0.048 satuan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan maka pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Tengah akan semakin menurun. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syamsul (2020) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan kurang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, dan penelitian yang dilakukan oleh Damaningrum (2015) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian yang akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Diharapkan akan ada aktivitas ekonomi dimana faktor-faktor produksi akan diolah yang akan menghasilkan output, dan menjadikan suatu proses balasan jasa.

### **Pengaruh Lain-Lain PAD Yang Sah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada penelitian menunjukkan bahwa lain-lain PAD yang sah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dari hasil persamaan regresi menunjukkan bahwa lain-lain PAD yang sah di Provinsi Sulawesi Tengah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Tengah. Diperoleh koefisien regresi untuk lain-lain PAD yang sah sebesar 0.387 hal ini berarti setiap terjadi penambahan retribusi daerah 1% maka akan terjadi kenaikan terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0.387 satuan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi penerimaan lain-lain PAD yang sah maka pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Tengah akan semakin meningkat, begitu sebaliknya jika penerimaan lain-lain PAD yang sah terjadi penurunan maka pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah akan semakin menurun. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syamsul (2020) mengatakan bahwa lain-lain PAD yang sah berpengaruh dan mempunyai kualifikasi yang baik terhadap pertumbuhan ekonomi.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **Kesimpulan**

1. Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah Periode 2015-2019.
2. Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah Periode 2015-2019.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah Periode 2015-2019.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah Periode 2015-2019.
5. Realisasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang secara bersama-sama atau serempak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah Periode 2015-2019.

#### **Saran**

Berdasarkan keterbatasan penelitian dan kesimpulan tentang pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Tengah periode 2015-2019, maka saran yang dapat peneliti ajukan terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pengelolaan sumber daya di setiap Kabupaten/Kota dan meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang ada di daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

1. Pemerintah harus lebih meningkatkan sumber pendapatan asli daerah pada bidang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan agar lebih mengoptimalkan, meningkatkan produksi dan meningkatkan kemampuan produktivitas agar bisa memberikan kontribusi yang besar untuk

pertumbuhan ekonomi bagi setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah.

2. Pemerintah dapat meningkatkan pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang dipisahkan agar lebih merata dan meningkat di seluruh daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah.

#### DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Sulawesi Tengah.

BPS, 2015. *Statistik Keuangan Daerah*. Sulawesi Tengah : Badan Pusat Statistik

\_\_\_\_\_, 2016. *Statistik Keuangan Daerah*. Sulawesi Tengah : Badan Pusat Statistik.

\_\_\_\_\_, 2017. *Statistik Keuangan Daerah*. Sulawesi Tengah : Badan Pusat Statistik.

\_\_\_\_\_, 2018. *Statistik Keuangan Daerah*. Sulawesi Tengah : Badan Pusat Statistik.

\_\_\_\_\_, 2019. *Statistik Keuangan Daerah*. Sulawesi Tengah : Badan Pusat Statistik

\_\_\_\_\_, 2019. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten-Kota Di Sulawesi Tengah Menurut Lapangan Usaha 2015-2019*. Sulawesi Tengah : Badan Pusat Statistik

Carunia Mulya Firdausy. 2017. *Kebijakan dan strategi peningkatan pendapatan asli daerah dalam pembangunan nasional*. Jakarta: yayasan pustaka obor Indonesia.

Jaya, I P.N. Panji Kartika dan A.N.B. Dwiandra. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 7 (1), 79-92.

Juanda . B, Junaidi . 2012. *Ekonometrika Deret waktu*. PT Penertbit IPB Press.

Kusmawati, lily dan I.G.B. Wiksuana. 2018. Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Unud*, Vol.7, No. 5, 2018 : 2592-2620.

Lindaman, K., K. Thurmaier, S.E. Development, C. Change, N. July, dan K. Lindaman. 2016. Beyond Efficiency and Economy : An Examination of Basic Needs and Fiscal Decentralization *The University of Chicago Press Stable* 50(4): 915-934.

Rahardjo Adisasmita, 2013 *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi Dan Pertumbuhan Wilayah*, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, Halaman 4

Rahardjo Adisasmita, 2014 *Pertumbuhan Wilayah Dan Wilayah Pertumbuhan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, , Halaman. 91

- Republik Indonesia 2009. Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Daerah. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Pemerintah Daerah. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Rori, Chindy Febry, Antonius, Dan Audie. 2016 Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2001-2013. *Jurnal Baerkala Ilmiah Efisiensi*, Volume 16 No.02.
- Saragih, Juli Panglima. 2003, Desentralisasi Fiskal Dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi, Penerbit Ghalia Indonesia.
- Siregar, Baldric. (2017). Akuntansi sector public (akuntansi keuangan pemerintah daerah berbasis akrual). Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Sugiyono. 2018. Metode Peneltitan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D (Metode Penelitian Bisnis). Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. 2000. *Makro Ekonomi Modern*. Jakarta : PT. Raja Drafindo Persada.
- Syamsul. 2020. Evaluasi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2014-2018. *E-jurnal berkala akuntansi dan keuangan Indonesia*. vol. 05 no. 01 (2020): 47-66.
- Saraswati, Ida Ayu., Ramantha, I Wayan., 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal dan Investasi Swasta sebagai Pemoderasi. *E-Journal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.24 No.1
- Todaro. Michael P. & Smith. Stephen C. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Edisi ke 9. Jakarta: Erlangga.
- Utami, Desak Nyoman., Indrajaya, I Gusti Bagus., 2019. Pengaruh PAD dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Bali. *E-Journal EP Unud*, Vol.8 No.10
- Watulingas, C.A.S, P. Kidangen, Daisy S.M. Engka. 2018 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, Vol.19 No.7.